



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PUJI SUGIHARTO, S.H.**

Jabatan : **Kepala Bagian Hukum**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDHI RAHARDJO, MM.**

Jabatan : **Sekretaris Daerah**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Daerah

Pemalang, 21 Januari 2019
Pihak Pertama,
Kepala Bagian Hukum

Drs. BUDHI RAHARDJO, MM.

PUJI SUGIHARTO, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN HUKUM**

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				
1.1	Kegiatan Pembentukan unit bantuan hukum		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara dan Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi ma	unit	8
1.2	Kegiatan Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat		jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani dan jumlah legal opini dalam satu tahun	permasalahan dan LO	12

No	Program	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	303.600.000	82.955.000	130.050.000	81.215.000	9.380.000
1.1	Kegiatan Pembentukan unit bantuan hukum	213.600.000	60.065.000	101.090.000	52.445.000	0
1.2	Kegiatan Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	90.000.000	22.890.000	28.960.000	28.770.000	9.380.000
2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.167.400.000	896.332.500	486.788.500	618.111.000	166.167.500
2.1	Kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	55.000.000	0	19.601.500	35.398.500	0
2.2	Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	350.000.000	114.580.000	93.002.000	108.852.500	33.565.000
2.3	Kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	295.000.000	147.807.500	0	147.192.500	0
2.4	Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan	350.000.000	141.850.000	65.925.000	118.200.000	24.025.000
2.5	Kegiatan Penyuluhan peraturan perundang-undangan	236.000.000	77.920.000	69.165.000	53.015.000	35.900.000

2.6	Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	150.000.000	32.767.500	54.762.500	32.287.500	30.182.500
2.7	Kegiatan Fasilitasi KEluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum	506.400.000	297.965.000	127.075.000	74.360.000	7.000.000
2.8	Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan HAM	100.000.000	39.810.000	26.495.000	18.900.000	14.795.000
2.9	Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-unda	125.000.000	43.632.500	30.762.500	29.905.000	20.700.000
Total Anggaran		2.471.000.000	979.287.500	616.838.500	699.326.000	175.547.500

Pihak Kedua,
Sekretaris Daerah

Pemalang, 21 Januari 2019
Pihak Pertama,
Kepala Bagian Hukum

Drs. BUDHI RAHARDJO, MM.

PUJI SUGIHARTO, S.H.

